

Implementasi Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang

Shinta Ferlita¹, Try Adhi Bangsawan², Dede Qodrat Alwajir³

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bina Bangsa

E-mail: ferlitashinta@gmail.com

Published: September , 2026

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis, yaitu Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Serang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya dalam penerapan SRIKANDI di lingkungan DPUPR Kota Serang.

Metode. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan SRIKANDI, dilengkapi observasi dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan empat indikator teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta divalidasi melalui triangulasi metode dan sumber.

Hasil. Implementasi SRIKANDI di DPUPR Kota Serang tidak berjalan optimal. Sosialisasi telah dilaksanakan namun tanpa arahan formal dan keteladanan pimpinan yang konsisten, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi menghambat peralihan penuh dari sistem manual, disposisi pelaksana menunjukkan kesenjangan antara pemahaman dan perilaku, serta struktur birokrasi belum ditopang oleh SOP tertulis dan keseragaman kode klasifikasi surat antarbidang.

Kesimpulan. Ketidakefektifan implementasi SRIKANDI bersumber dari akumulasi kelemahan pada keempat variabel implementasi kebijakan yang saling memperkuat, bukan pada satu faktor tunggal, sehingga diperlukan intervensi komprehensif yang mencakup komitmen pimpinan, pelatihan berkelanjutan, penguatan infrastruktur, dan penetapan SOP tertulis.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, SRIKANDI, kearsipan dinamis, administrasi publik, teori Edwards III

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong transformasi digital di berbagai aspek administrasi pemerintahan. Digitalisasi memberi peluang bagi instansi pemerintah untuk mengelola data dan informasi secara lebih terorganisir, mengurangi kesalahan administratif, serta mempercepat proses pengambilan keputusan. Salah satu wujud konkret transformasi ini adalah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, sebagai kerangka kerja untuk mengintegrasikan seluruh proses administrasi pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Salah satu elemen penting SPBE adalah digitalisasi pengelolaan arsip dan persuratan, mengingat arsip merupakan bukti hukum dan dasar pertanggungjawaban penyelenggaraan layanan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Untuk itu, Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagai aplikasi umum bidang kearsipan dinamis melalui Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 679 Tahun 2020, yang wajib diterapkan oleh seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah. Di Provinsi Banten, kewajiban ini diperkuat melalui Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2023, sehingga seluruh Organisasi Perangkat Daerah, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Serang, terikat untuk mengimplementasikan SRIKANDI.

Meskipun regulasi telah tersedia, penerapan SRIKANDI di berbagai instansi pemerintah di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Banyak instansi masih bergantung pada sistem administrasi berbasis kertas sehingga proses pencatatan, penyimpanan, dan penelusuran arsip menjadi kurang efektif. Kondisi serupa turut memengaruhi pelaksanaan SRIKANDI di DPUPR Kota Serang, yang berpotensi menghambat efisiensi kerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan arsip serta persuratan dinas.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan pada Implementasi Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis pada DPUPR Kota Serang, khususnya dalam penerapan aplikasi SRIKANDI, dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) menganalisis pelaksanaan implementasi Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 679 Tahun 2020 dalam penerapan SRIKANDI pada DPUPR Kota Serang, dan (2) mengidentifikasi serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kendala dalam implementasi tersebut.

METODE

Partisipan Penelitian

Informan penelitian dipilih secara purposif dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan penggunaan aplikasi SRIKANDI di lingkungan DPUPR Kota Serang, terdiri atas pengelola arsip Sekretariat, arsiparis terampil, pengelola arsip bidang, pranata hubungan masyarakat, serta teknisi sarana dan prasarana (rincian pada Tabel 1).

Prosedur Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam praktik pengelolaan arsip dinamis pada satu lokasi penelitian. Prosedur penelitian meliputi empat tahap: (1) tahap pra-lapangan, meliputi penyusunan rancangan penelitian, studi literatur, observasi awal, dan penentuan informan; (2) tahap pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang bersifat siklus; (3) tahap analisis data yang dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data, meliputi reduksi data, penyajian data dalam bentuk naratif, dan penarikan kesimpulan sementara; serta (4) tahap validasi data melalui triangulasi metode, triangulasi sumber, dan member check kepada informan.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengacu pada empat indikator teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai sejauh mana kebijakan penggunaan SRIKANDI telah diimplementasikan dalam mendukung tata kelola administrasi dan kearsipan yang efektif dan efisien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi yang melibatkan informan dengan keterkaitan langsung terhadap pengelolaan, pelaksanaan, dan penggunaan aplikasi SRIKANDI (Tabel 1). Temuan disajikan berdasarkan empat indikator teori implementasi kebijakan George C. Edwards III.

Tabel 1. Informan Penelitian

Kode Informan	Jabatan/Peran
I.1.1	Pengelola Arsip Sekretariat

I.2.1	Arsiparis Terampil
I.3.1	Pengelola Arsip Bidang Penataan Ruang
I.3.2	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil
I.4.1	Teknisi Sarana dan Prasarana
I.4.2	Penata Bangunan

Komunikasi

Sosialisasi penggunaan SRIKANDI telah dilaksanakan sebanyak dua kali, yaitu pada awal dan akhir tahun 2025, namun belum disertai arahan formal maupun surat edaran resmi dari pimpinan yang mewajibkan penggunaannya secara menyeluruh. Kepala Dinas cenderung tetap menggunakan surat fisik meskipun kebijakan mewajibkan penggunaan SRIKANDI, sehingga surat baru diunggah ke sistem setelah ditandatangani secara fisik. Kondisi ini memberikan sinyal ambigu bagi pegawai dan mengindikasikan bahwa pesan kebijakan belum tersampaikan secara konsisten dan berkelanjutan, sejalan dengan pandangan Edwards III (1980) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan komunikasi yang jelas, konsisten, dan menyeluruh. Meski demikian, upaya perbaikan komunikasi mulai dirumuskan melalui rencana sosialisasi internal lanjutan bagi pengelola SRIKANDI di setiap bidang.

Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasi menjadi kendala utama. Sebagian pegawai belum sepenuhnya terampil mengoperasikan aplikasi, sementara perangkat keras yang tersedia terbatas dan kerap mengalami gangguan teknis, sehingga mendorong pegawai kembali menggunakan mekanisme manual. Hal ini sejalan dengan pandangan Edwards III bahwa kecukupan sumber daya, baik manusia maupun sarana pendukung, sangat menentukan efektivitas implementasi kebijakan.

Disposisi atau Sikap Pelaksana

Ditemukan kesenjangan antara pemahaman dan perilaku pelaksana (*intention-behavior gap*): pegawai secara kognitif mengakui keunggulan sistem digital, namun belum sepenuhnya mengubah kebiasaan kerja manual yang telah mengakar bertahun-tahun. Sikap pimpinan yang belum sepenuhnya konsisten turut memengaruhi komitmen pelaksana di tingkat operasional.

Struktur Birokrasi

Ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis yang mengikat seluruh unit kerja, tidak aktifnya akun sejumlah pejabat dalam sistem, serta ketidakseragaman kode klasifikasi surat antarbidang menunjukkan bahwa implementasi SRIKANDI belum ditopang fondasi kelembagaan yang memadai. Akibatnya, setiap unit kerja cenderung berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang efektif.

Secara keseluruhan, keempat variabel implementasi kebijakan tersebut saling berkaitan dan menunjukkan pola kegagalan yang serupa, yaitu kesenjangan antara ketentuan formal dan praktik di lapangan. Ketidakefektifan implementasi SRIKANDI di DPUPR Kota Serang bukan disebabkan oleh kelemahan pada satu variabel semata, melainkan oleh akumulasi kelemahan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang terjadi secara bersamaan dan saling memperkuat.

Adapun faktor pendukung implementasi meliputi: seluruh pegawai telah memiliki akun SRIKANDI secara individual, pengecekan aplikasi dilakukan rutin oleh pengelola di tingkat sekretariat, tersedianya 2.988 kode klasifikasi arsip aktif dalam sistem, penerapan tanda tangan elektronik yang telah berjalan, serta mulai tumbuhnya inisiatif perbaikan dari pengelola tingkat menengah. Faktor penghambat mencakup inkonsistensi komitmen pimpinan, minimnya pelatihan teknis berkelanjutan, keterbatasan perangkat keras dan gangguan teknis yang berulang, kebiasaan kerja konvensional yang kuat, ketiadaan SOP, tidak aktifnya sejumlah akun pejabat, serta ketidakseragaman kode klasifikasi surat.

KESIMPULAN

Implementasi SRIKANDI di DPUPR Kota Serang tidak berjalan secara optimal. Analisis terhadap empat variabel teori implementasi kebijakan George C. Edwards III menunjukkan pola kegagalan yang saling berkaitan: sosialisasi telah dilaksanakan namun tanpa arahan formal dan keteladanan pimpinan yang konsisten, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur menghambat peralihan penuh ke sistem digital, disposisi pelaksana menunjukkan kesenjangan antara pemahaman dan perilaku, serta struktur birokrasi belum ditopang SOP tertulis dan keseragaman kode klasifikasi surat antarunit kerja.

Faktor pendukung implementasi meliputi kepemilikan akun SRIKANDI oleh seluruh pegawai, pengecekan aplikasi rutin, ketersediaan kode klasifikasi arsip aktif, penerapan tanda tangan elektronik, serta inisiatif perbaikan dari pengelola tingkat menengah. Faktor penghambat meliputi inkonsistensi komitmen pimpinan, minimnya pelatihan berkelanjutan, keterbatasan perangkat keras, kebiasaan kerja konvensional, ketiadaan SOP, tidak aktifnya sejumlah akun pejabat, dan ketidakseragaman kode klasifikasi surat. Faktor-faktor penghambat ini bersifat multidimensional dan saling berkaitan sehingga memerlukan pendekatan penanganan yang komprehensif dan sistematis, mencakup komitmen dan keteladanan pimpinan, pelatihan teknis berbasis praktik langsung, penguatan infrastruktur teknologi, serta pengelolaan perubahan (*change management*) sebagai bagian integral dari strategi implementasi sistem informasi pemerintahan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang atas izin dan kesediaannya menjadi lokasi penelitian, kepada seluruh informan atas kontribusi data dan informasi yang diberikan, serta kepada Universitas Bina Bangsa atas dukungan akademik selama proses penelitian ini.

REFERENSI

- AG Subarsono. (2025). Analisis Kebijakan Publik (Hal-90). Pustaka Belajar.
- Dani, Rahiman. (2022). Reformasi Administrasi Publik. Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka.
- Hasan, Ahmad Zainullah., et al. (2025). Administrasi Publik Teori, Sistem Dan Praktik. Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Mindarti, Lely Indah. (2016). Aneka Pendekatan Dan Teori Dasar Administrasi Publik. Malang: UB Press.
- Revida., et al. (2021). *Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. (Yayasan Kita Menulis, 2021).
- Sarjito, Aris. (2024). Dasar-Dasar Administrasi Publik. Bandung: Indonesia Emas Group.
- Sepriano., et al. (2023). Transformasi Administrasi Publik Menghadapi Era Digital. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.